## Daftar Pemohon informasi Tahun 2024

No	PEMOHON	TERMOHON	DATA YANG DIMINTA
1.	Ikatan pelajar mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS)	Dinas Perkim	<ul> <li>Penerima pembebasan lahan TA 2021 – 2023</li> <li>Transparansi penyaluran dana TA 2024 beserta data penerima</li> </ul>
2.	Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran & Keadilan (AMPERAK)	Dinas Pariwisata Sulbar	<ul> <li>DPA dinas pariwisata TA 2022-2023</li> <li>Jumlah bantuan atau hibah dan peruntukan dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kepada dinas pariwisata TA 2022 – 2023</li> </ul>
3.	Adi Arwan Alimin	Dinas Perpustakaan & Kearsipan Sulbar	<ul> <li>Pengadaan buku novel epos Daeng Rioso (prahara bumi balanipa)</li> <li>Pengadaan buku Kampung Jawa ditanah Mandar</li> </ul>
4.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas Perkim	<ul> <li>Kontrak &amp; RAB pekerjaan pembangunan perumahan pasca gempa bumi di kec. Ulumanda Kab. Majene tahun 2021 – 2023 yang telah dilegalisasi</li> <li>Data lokasi yang akan dibebaskan untuk pembangunan bandara dan lokasi yang terbayarkan (lengkap nilai pembayarannya) tahun 2021-2023 yang sudah dilegalisasi</li> </ul>
5.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	BPBD	<ul> <li>Laporan kegiatan dana siap pakai (DSP) untuk siaga darurat hydrometeorology kering tahun 2023 dengan nilai anggaran 500 juta, yang sudah dilegalisasi</li> <li>Laporan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana tahun 2023 dengan anggaran 1,5 miliar, yang sudah dilegalisasi</li> </ul>
6.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas Sosial	- Data lengkap kelompok penerima bantuan yang terealisasi tahun 2023 yang sudah dilegalisasi
7.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas Pendidikan	- Data perencanaan konstruksi SMA & SMK, gambar serta RAB tahun 2024 yang sudah dilegalisasi
8.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas PUPR	- Data perencanaan konstruksi gambar serta RAB tahun 2024 yang sudah dilegalisasi
9.	LSM Merdeka Manakarra Sulbar	Bawaslu Kab. Mamuju	Diteruskan ke Bawaslu Kab. Mamuju karena Bukan wewenang PPID Prov. Sulbar / ditolak
10.	Lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan (LP-KPK)	Dinas Tenaga Kerja	- Nama kelompok masyarakat (Pokmas) penerima kegiatan padat karya - Nama ketua kelompok, sekretaris dan bendahara - Jumlah anggaran yang dikelola

Cat: Jumlah permohonan informasi tahun 2024 sebanyak 10 permohonan, Jumlah permohonan yang ditolak sebanyak 1 permohonan, karena bukan kewenangan PPID

## Pemohon yang mengajukan keberatan tahun 2024

No	PEMOHON	TERMOHON	DATA YANG DIMINTA
1.	Aliansi masyarakat peduli kebenaran dan keadilan (AMPERAK)	Dinas Pariwisata Sulbar	<ul> <li>DPA dinas pariwisata TA 2022-2023</li> <li>Jumlah bantuan atau hibah dan peruntukan dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kepada dinas pariwisata TA 2022 – 2023</li> </ul>
2.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas Perkim Sulbar	<ul> <li>Kontrak &amp; RAB pekerjaan pembangunan perumahan pasca gempa bumi di kec. Ulumanda Kab. Majene tahun 2021 – 2023 yang telah dilegalisasi</li> <li>Data lokasi yang akan dibebaskan untuk pembangunan bandara dan lokasi yang terbayarkan (lengkap nilai pembayarannya) tahun 2021-2023 yang sudah dilegalisasi</li> </ul>
3.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas Sosial	- Data lengkap kelompok penerima bantuan yang terealisasi tahun 2023 yang sudah dilegalisasi

Cat : Jumlah keberatan atas permohonan informasi yg tidak ditanggapi oleh PPID Pelaksana sebanyak 3 surat